

Judul : Dana Numpuk Di Bank : Optimalkan Untuk Penanganan Pandemi
Tanggal : Minggu, 23 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Dana Numpuk Di Bank Optimalkan Untuk Penanganan Pandemi



Puteri Komarudin

KEMENTERIAN Keuangan mencatat serapan belanja APBD tahun 2021 sebesar Rp 1.087,66 triliun atau hanya 89 persen dari pagu belanja senilai Rp 1.224,73 triliun. Capaian belanja ini justru turun sebesar 2,48 persen dibandingkan tahun 2020.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan serapan belanja daerah guna mendukung upaya penanganan pandemi dan menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah. Serapan belanja yang kurang optimal ini di antaranya karena masih tingginya saldo anggaran pemerintah daerah yang terparkir di bank.

Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam mengatur ritme serapan belanja daerah sehingga peran APBD tidak bekerja optimal. Padahal, anggaran ini semestinya bisa digunakan untuk menunjang pemenuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

“Karenanya, perlu segera dicarikan solusi oleh Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK),” kata Puteri

dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan DJPK di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1).

DJPK mencatat, posisi saldo dana pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp 113,98 triliun hingga akhir Desember 2021. Angka tersebut merupakan saldo akhir tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Puteri pun mendorong DJPK bersama pemerintah daerah untuk menetapkan target eksekusi serapan anggaran setiap bulannya.

“Atur ritme belanja daerah sehingga tidak menumpuk ketika menuju akhir tahun. Sekaligus meminimalisir sisa saldo anggaran yang terendap di bank. Karena di tengah kondisi pandemi sekarang ini, belanja daerah menjadi salah satu tumpuan menggerakkan perputaran ekonomi dan menjaga konsumsi,” tegas Puteri.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini juga menyoroti kinerja belanja kesehatan untuk penanganan pandemi di daerah yang berasal dari anggaran *earmark* dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021. Hal ini merujuk data DJPK yang menyebutkan anggaran tersebut hanya terserap 72,17 persen dari total pagu anggaran yang mencapai Rp 54,32 triliun.

Di tengah tekanan dari segi penerimaan negara, ujarnya, pemerintah pusat tetap berupaya untuk menjaga penerimaan daerah melalui TKDD. Tetapi, perlu dipastikan bahwa anggaran tersebut diteruskan ke belanja daerah, khususnya untuk belanja penanganan pandemi.

“Apalagi anggaran yang berasal dari *earmarking* DAU/DBH justru hanya terserap 62,40 persen. Padahal, bisa digunakan untuk dukungan vaksinasi, dukungan pada kesehatan, insentif tenaga kesehatan, maupun belanja kesehatan lainnya,” jelas Puteri. ■ ONI